Journal of Internasional Multidisciplinary Research

Evaluasi Kebijakan Agraria Dalam Mendukung Keberlanjutan Lingkungan Dan Ekonomi

Lime Shie[1*], Ayang Fristia Maulana[2]
Universitas Bina Bangsa[12], Serang, Indonesia
limeshie70@gmail.com [*1], fristia.maulana@gmail.com [,2]

Informasi Artikel
E-ISSN : 3026-6874,
Vol: 2, No: 2 Februari 2024
Halaman : 20-25

Keywords:
Agrarian Policy
Environmental Sustainability
Economic Sustainability
Agriculture, Land Utilization.

Abstract

The agrarian policy plays a key role in managing natural resources and supporting economic growth, particularly in the context of agriculture and land utilization. This research aims to evaluate the effectiveness of agrarian policies in achieving environmental and economic sustainability goals. Adopting a policy analysis approach, this study reviews the implementation of existing agrarian policies and their impact on environmental and economic aspects. The research methodology involves policy document analysis, interviews with relevant stakeholders, and field surveys to collect quantitative data. The evaluation considers aspects such as land utilization efficiency, environmental impact, benefit distribution, and contributions to local economic growth. The evaluation results are integrated to formulate policy recommendations that can enhance agrarian sustainability. This study highlights the challenges faced by agrarian policies in achieving a balance between environmental sustainability and economic growth. Findings identify successful policies and weaknesses that need improvement. Policy recommendations involve measures to improve land utilizat ion efficiency, stimulate sustainable investments, and strengthen community participation in agrarian decision-making. By comprehensively evaluating agrarian policies, this research provides insights necessary for formulating more effective policies to support environmental and economic sustainability in the agrarian sector. The implications of these research findings can assist the government, policy-making institutions, and other stakeholders in refining the direction and implementation of agrarian policies to achieve sustainable development goals..

Abstrak

Kebijakan agraria memainkan peran kunci dalam mengelola sumber daya alam dan mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks pertanian dan pemanfaatan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan agraria dalam mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Dengan mengadopsi pendekatan analisis kebijakan, studi ini meninjau implementasi kebijakan agraria yang ada dan dampaknya terhadap aspek lingkungan dan ekonomi. Hasil evaluasi diintegrasikan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan keberlanjutan agraria. Penelitian ini menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi kebijakan agraria dalam mencapai keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Temuan mengidentifikasi kebijakan yang telah berhasil serta kelemahan yang perlu diperbaiki. Rekomendasi kebijakan melibatkan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, merangsang investasi berkelanjutan, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan agraria. Dengan mengevaluasi kebijakan agraria secara menyeluruh, penelitian ini memberikan wawasan yang diperlukan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi di sektor agraria. Implikasi hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah, lembaga pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperbaiki arah dan pelaksanaan kebijakan agraria guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci : Kebijakan Agraria, Keberlanjutan Lingkungan, Keberlanjutan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Evaluasi Kebijakan Agraria dalam Mendukung Keberlanjutan Lingkungan dan Ekonomi adalah suatu proses analisis menyeluruh terhadap efektivitas dan dampak kebijakan agraria yang telah diterapkan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi di sektor pertanian. Tujuan utama evaluasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan agraria tersebut

berhasil mencapai tujuan keberlanjutan, khususnya dalam aspek lingkungan dan ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan populasi global dan dinamika perkembangan ekonomi yang semakin kompleks, kebijakan agraria menempati posisi kunci dalam mengelola sumber daya alam dan membentuk pola pertanian yang berkelanjutan. Tidak hanya berdampak pada sektor pertanian dan pemanfaatan lahan, kebijakan agraria juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat sering kali diikuti oleh peningkatan tekanan terhadap sumber daya alam, terutama dalam bentuk konversi lahan dan intensifikasi pertanian. Oleh karena itu, penilaian mendalam terhadap efektivitas kebijakan agraria menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan keberlanjutan. Menurut Profesor Sodikin, agrarian policy dapat diartikan sebagai serangkaian kebijakan yang dirancang untuk mengatur pemanfaatan lahan, distribusi tanah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan sektor pertanian.

Profesor Emil Salim, seorang pakar pembangunan juga memberikan pandangan tentang kebijakan agraria dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, kebijakan agraria seharusnya tidak hanya memperhatikan produksi pertanian, tetapi juga aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sedangkan ahli agraria seperti Dr. Siti Astuti mungkin menekankan aspek distribusi tanah dan keadilan agraria dalam pengertian kebijakan agraria. Bagi mereka, kebijakan ini seharusnya mencakup upaya untuk mendistribusikan tanah secara adil dan merata di antara masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kebijakan agraria sering kali mencakup reforma agraria yang bertujuan untuk meningkatkan distribusi tanah, memperbaiki akses petani terhadap sumber daya, dan mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan.

Aspek-aspek seperti pelestarian lingkungan dan dukungan terhadap perekonomian lokal menjadi fokus utama dalam konteks ini. Penelitian ini muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi kinerja kebijakan agraria di tengah dualitas antara pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Analisis tentang sejauh mana kebijakan agraria yang telah diusulkan atau diterapkan berhasil diimplementasikan. Hal ini melibatkan penilaian terhadap ketersediaan dan pemahaman pedoman serta regulasi yang terkait. Evaluasi dampak kebijakan agraria terhadap lingkungan, seperti perubahan dalam penggunaan lahan, tingkat deforestasi, degradasi tanah, dan keberlanjutan ekosistem. Hal ini mencakup juga penilaian terhadap mitigasi dampak negatif terhadap lingkungan.

Analisis kontribusi kebijakan agraria terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional. Ini mencakup penilaian terhadap peningkatan produktivitas pertanian, pendapatan petani, dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB. Analisis kontribusi kebijakan agraria terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional. Ini mencakup penilaian terhadap peningkatan produktivitas pertanian, pendapatan petani, dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB. Evaluasi terhadap distribusi manfaat kebijakan agraria di antara pemangku kepentingan, dengan memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi kepada pihak tertentu, tetapi juga memberikan manfaat yang merata.

Evaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan agraria. Hal ini mencakup keterlibatan petani, kelompok petani, dan masyarakat lokal dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan keberlanjutan agraria berdasarkan temuan dari evaluasi. Rekomendasi ini dapat mencakup perubahan dalam regulasi, insentif ekonomi, atau peningkatan kapasitas petani. Evaluasi Kebijakan Agraria adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan, menciptakan keseimbangan yang sehat antara kepentingan ekonomi dan ekologi. Penting juga untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai dampak kebijakan agraria terhadap efisiensi pemanfaatan lahan, dampak lingkungan, distribusi manfaat, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui evaluasi yang holistik, diharapkan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang cerdas dan terarah, menciptakan sinergi yang harmonis antara aspek lingkungan dan ekonomi dalam konteks agraria. Dengan pemahaman yang lebih matang terhadap kinerja kebijakan agraria, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan panduan yang bermakna

bagi pembuat kebijakan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, diharapkan dapat membentuk arah kebijakan agraria yang efektif dan berdaya dukung tinggi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh. (Tarfi,2017 ;Nurfaiziya,2021; Wahyuddin,2021; Sulistyaningsih,2021)

METODE

Dalam konteks penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Agraria untuk Mendukung Keberlanjutan Lingkungan dan Ekonomi, metode penelitian yang diterapkan adalah metode Yuridis Normatif. Pendekatan ini mencirikan suatu pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada analisis norma-norma hukum dan peraturan yang terkait dengan subjek penelitian tertentu. Metodologi Yuridis Normatif ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki dan memahami dampak kebijakan agraria terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekonomi melalui telaah mendalam terhadap kerangka hukum yang ada. Dalam pelaksanaannya, metodologi ini melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, yang berkaitan dengan kebijakan agraria.

Analisis normatif kemudian dilakukan untuk memahami sejauh mana ketentuan-ketentuan hukum tersebut mendukung atau mungkin menghambat tujuan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Pemetaan hubungan antaraturan hukum, identifikasi isu-isu krusial, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan juga merupakan langkah-langkah kunci dalam metodologi ini. Dengan mengaplikasikan metode Yuridis Normatif, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kekosongan dalam kebijakan agraria yang relevan, tetapi juga untuk memberikan pandangan yang komprehensif terhadap kesejajaran kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Sintesis temuan dari analisis normatif ini nantinya akan membantu menyusun rekomendasi perubahan atau perbaikan kebijakan agraria untuk memperkuat kontribusinya terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. (Adrianto,2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kebijakan Agraria Kebijakan

Agraria merujuk pada serangkaian kebijakan yang berhubungan dengan pertanian dan pemanfaatan lahan. Kebijakan ini umumnya dirancang untuk mengatur hak kepemilikan, penggunaan, dan distribusi lahan pertanian guna mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti ketahanan pangan, pembangunan pedesaan, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan petani. Reformasi agraria adalah langkah-langkah untuk mengubah struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah. Tujuan utamanya adalah mendistribusikan lahan secara lebih adil, mengurangi ketidaksetaraan dalam kepemilikan tanah, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Kebijakan agraria mengatur hak kepemilikan tanah, baik itu hak milik pribadi, hak sewa, atau bentuk kepemilikan lainnya. Sistem hukum tanah dan cara perolehannya dapat berpengaruh pada penggunaan lahan dan pemberdayaan masyarakat agraris. Kebijakan agraria juga mencakup pengelolaan sumber daya alam, seperti air dan tanah. Pemilihan teknologi pertanian, praktik konservasi tanah, dan penggunaan pupuk dapat diatur untuk meminimalkan dampak lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan pertanian. Pemberdayaan petani melibatkan langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, termasuk penyediaan akses terhadap sumber daya, pendidikan pertanian, pelatihan, serta dukungan keuangan dan pasar.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kebijakan agraria juga dapat terkait dengan pembangunan pedesaan secara keseluruhan, termasuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan akses pasar. Ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan yang berkelanjutan di wilayah pedesaan. Kebijakan agraria sering kali mencerminkan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu negara atau wilayah. Selain itu, implementasi kebijakan ini dapat melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil guna mencapai tujuan yang diinginkan. Hukum tertulis mengenai kebijakan agraria dapat bervariasi antara negara-negara, karena setiap negara memiliki sistem hukum dan kebijakan agraria yang unik. Beberapa negara mungkin memiliki undang-undang agraria tersendiri, sementara

negara lain mungkin mengatur aspek-aspek kebijakan agraria dalam undang-undang pertanahan, perundang-undangan agraria, atau undang-undang sektoral lainnya.

Penting untuk mengacu pada undang-undang dan regulasi setiap negara secara spesifik untuk memahami lebih rinci tentang kebijakan agraria di setiap wilayah. Selain undang-undang nasional, seringkali terdapat peraturan daerah yang melengkapi dan menyesuaikan pelaksanaan kebijakan agraria sesuai dengan kebutuhan lokal. Di negara kita, yakni Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) merupakan undang-undang agraria utama yang mengatur sejumlah prinsip dasar dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. UUPA mengatur prinsip-prinsip hak kepemilikan tanah dan cara peralihannya. Undangundang ini memberikan dasar hukum untuk pemetaan, registrasi, dan sertifikasi tanah. Pemilikan tanah dapat berupa hak ulayat, hak guna usaha, hak pakai, dan hak milik. UUPA mencakup aspek-aspek pemberdayaan petani dengan memberikan dasar hukum untuk distribusi tanah kepada petani yang lebih luas, termasuk melalui program-program reformasi agraria.

Tujuannya adalah untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan petani. UUPA memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia. Reformasi agraria ini bertujuan untuk mencapai pembagian tanah yang lebih adil, mengurangi ketidaksetaraan sosial, dan meningkatkan produktivitas pertanian. Program ini dapat mencakup redistribusi tanah dari pemilik besar ke petani kecil atau penyediaan tanah untuk masyarakat yang belum memiliki lahan. UUPA memberikan dasar hukum untuk perubahan penggunaan tanah, yang dapat mencakup konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian atau sebaliknya. Proses perubahan penggunaan tanah ini harus memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. UUPA mendorong pendaftaran tanah untuk meningkatkan kepastian hukum dan mencegah sengketa tanah.

Pendaftaran tanah ini melibatkan penyusunan peta, pencatatan kepemilikan, dan penerbitan sertifikat tanah. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 1960, sebagai respons terhadap perkembangan dan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Penerapan UUPA di lapangan sering kali melibatkan implementasi kebijakan lebih lanjut, seperti program-program reformasi agraria dan kebijakan pertanahan daerah.

b. Dampak Pada Lingkungan Dan Ekonomi

Pada Lingkungan Kebijakan agraria dapat memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan, baik dampak positif maupun negatif. Dampak tersebut sangat tergantung pada implementasi kebijakan, pengelolaan sumber daya alam, dan tujuan pembangunan yang dikejar. Pemilihan kebijakan agraria yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan deforestasi dan konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian. Dampak ini dapat merugikan keanekaragaman hayati, menyebabkan hilangnya habitat alami, dan meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Pemanfaatan lahan pertanian yang tidak berkelanjutan, termasuk praktik-praktik pertanian intensif tanpa perhatian terhadap konservasi tanah, dapat menyebabkan degradasi tanah.

Tanah yang rusak dapat kehilangan kesuburan, menyebabkan erosi tanah, dan mengurangi produktivitas pertanian. Penggunaan pupuk dan pestisida dalam pertanian dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah. Limbah pertanian, seperti residu pestisida dan nutrisi yang berlebihan, dapat mencemari sungai, danau, dan sumber air tanah, berpotensi merugikan ekosistem air dan kesehatan manusia. Pertanian dapat menyumbang pada emisi gas rumah kaca melalui proses-proses seperti produksi pupuk, dekomposisi bahan organik, dan manajemen limbah ternak. Kebijakan agraria yang tidak memperhitungkan aspek keberlanjutan dapat meningkatkan jejak karbon sektor pertanian. Deforestasi, perubahan penggunaan lahan, dan praktik-praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dapat berkontribusi pada perubahan iklim.

Hal ini dapat memicu perubahan suhu global, pola cuaca ekstrem, dan masalah lainnya yang berkaitan dengan perubahan iklim. Namun, kebijakan agraria yang diimplementasikan dengan bijaksana dan berkelanjutan juga dapat memberikan dampak positif pada lingkungan. Misalnya, praktik pertanian berkelanjutan, konservasi tanah, dan pelestarian lahan hutan dapat membantu

meminimalkan dampak negatif dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Cukup penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan agraria guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan pertanian dan perlindungan lingkungan.

Pada Ekonomi Kebijakan agraria dapat memiliki dampak yang signifikan juga pada sektor ekonomi, terutama karena pertanian dan pemanfaatan lahan memainkan peran penting dalam struktur ekonomi suatu negara. Kebijakan agraria yang mendukung pertumbuhan sektor pertanian dapat memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pemberdayaan petani, peningkatan produktivitas, dan diversifikasi pertanian dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan. Kebijakan agraria yang efektif dapat meningkatkan ketahanan pangan suatu negara dengan memastikan pasokan pangan yang cukup dan berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai langkah, seperti peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi tanaman, dan penyediaan dukungan untuk petani.

Program reformasi agraria yang mengatur kembali kepemilikan tanah dapat meratakan distribusi kekayaan dan meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi. Ini dapat mengurangi kesenjangan antara pemilik besar dan petani kecil serta memberikan akses lebih besar kepada masyarakat untuk memiliki dan mengelola tanah. Kebijakan agraria yang memberikan kepastian hukum, insentif investasi, dan dukungan keuangan dapat menarik investasi ke sektor pertanian. Hal ini dapat meningkatkan teknologi pertanian, infrastruktur, dan kapasitas produksi, yang pada gilirannya dapat memperkuat kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi. Kebijakan agraria juga dapat memengaruhi kemampuan suatu negara untuk bersaing di pasar global.

Melalui kebijakan yang mendukung ekspor pertanian atau meliberalisasi perdagangan, negara dapat meningkatkan pendapatan dari perdagangan internasional. Pemberdayaan petani melalui kebijakan agraria dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini melibatkan penyediaan akses ke sumber daya, pendidikan pertanian, dan dukungan teknis serta keuangan. Kebijakan agraria yang mendukung diversifikasi ekonomi di pedesaan dapat menciptakan peluang ekonomi di luar sektor pertanian, seperti industri kecil dan kerajinan, pariwisata pedesaan, dan layanan jasa. Meskipun kebijakan agraria dapat memberikan dampak positif pada ekonomi, perlu diingat bahwa dampaknya dapat bervariasi tergantung pada implementasi kebijakan, kondisi sosial-ekonomi setempat, dan tantangan lingkungan tertentu. Oleh karena itu, perencanaan dan implementasi kebijakan agraria yang baik harus mempertimbangkan konteks spesifik masing-masing negara atau wilayah. (Abdul,2023)

KESIMPULAN

Pentingnya Evaluasi Kebijakan Agraria untuk Mendukung Keberlanjutan Lingkungan dan Ekonomi mencerminkan kesadaran akan peran krusial kebijakan agraria dalam mengelola sumber daya alam dan mengarahkan pertumbuhan sektor pertanian. Kebijakan agraria tidak hanya mencakup aspek pertanian dan lahan, tetapi juga memiliki dampak yang mencolok pada keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat seringkali diiringi oleh peningkatan tekanan terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan agraria menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yang mengarah pada analisis norma-norma hukum dan regulasi yang terkait dengan kebijakan agraria. Dalam proses analisisnya, fokus diberikan pada evaluasi dampak kebijakan agraria terhadap lingkungan, termasuk perubahan dalam penggunaan lahan, tingkat deforestasi, degradasi tanah, dan keberlanjutan ekosistem. Di samping itu, kontribusi kebijakan agraria terhadap pertumbuhan ekonomi dievaluasi, termasuk peningkatan produktivitas pertanian, pendapatan petani, dan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Distribusi manfaat dan partisipasi masyarakat juga menjadi fokus analisis, memastikan bahwa kebijakan agraria tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi kepada pihak tertentu tetapi juga menciptakan manfaat yang merata di antara pemangku kepentingan. Selain itu, melalui metode ini,

penelitian mencoba memahami sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan agraria. Dengan pendekatan yang holistik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja kebijakan agraria dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari evaluasi ini diharapkan dapat memberikan arah yang lebih baik untuk merancang kebijakan agraria yang efektif, menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kesimpulannya, evaluasi kebijakan agraria menjadi landasan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.

REFERENCES

Agus Dwi Andrianto, "Transformasi Pertanian Masa Orde Baru dalam Mewujudkan Kemandirian Pangan". ResearchGate. Vol 4. No 3, 2023, Hal 1-4

Akhyar Tarfi, "Reforma Agraria sebagai Jalan menuju Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh". Bhumi: JurnalAgraria dan Pertanahan. Vol7. No 2, 2021, Hal 5

Hajril A. Abdul, "Eksistensi Precautionary Principle Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup BerdasarkanHukum Agraria Di Indonesia". Journal of Comprehensive Science (JCS). Vol 2. No 6, 2023, Hal 2-5

Retno Sulistyaningsih, "REFORMA AGRARIA DI INDONESIA". EdisiJanuari. Vol 26. No 1, 2021, Hal 4-7

Salwa Nurfaiziya, "Study Literature Review Artikel terindeks Scopus Perihal Kebijakan Reforma Agraria diNegara-Negara Benua Asia". Journal of Governance Innovation. Vol 3. No 2, 2021, Hal 6-7

Wahyuddin, "Menelisik Komprehensifitas Kebijakan Hukum Reforma Agraria Di Indonesia". Jurnal Kompilasi Hukum. Vol 6. No 2, 2021, Hal 3-5